

IMPLEMENTASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI WILAYAH KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

(Studi kasus :)

Oleh

FAJAR MULIA

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah
Jember

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah kecamatan Panti Kabupaten Jember” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di wilayah kecamatan Panti dan untul mengetahui faktor-faktor apasaja yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari kantor PPL wilayah Panti. Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti sudah berjalan sesuai dengan prosedur. pembuatan RDKK oleh klompok, tani pelayanan yang dilakukan oleh PPL Dan prangkat yang berkaitan hingga pendistribusian sudah berjalan sesuai rencana. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Selama ini adapun permasalahan yang terjadi di lapangan merupakan permasalahan yang di anggap kecil karena permasalahan tersebut dapat di selesaikan, dan permasalahan besar yang selama ini terjadi di wilayah lain seperti penyelewengan pupuk dan penimbunan pupuk bersubsidi tidak terjadi di wilayah panti.

Kata kunci : *Implementasi, Penyaluran, Pupuk Bersubsidi.*

ABSTRACT

This study, entitled "Implementation of Regional Distribution of Subsidized Fertilizer in Panti subdistrict Jember" aims to find out how the mechanism of implementation Distribution of Subsidized Fertilizer In the districts of Panti and untul mengetahui anything what factors that hamper the delivery of subsidized fertilizer.

The research method uses a qualitative approach. Sources of data obtained from the office PPL Panti region. Collecting data through interviews, observation and documentation, analysis of data using the model of Miles and Huberman which may include data reduction, data presentation and conclusion. of the research results can be concluded that the implementation of

subsidized fertilizer distribution in the District Panti been running in accordance with procedures. manufacture RDKK by tiem, farmer services performed by PPL And prangkat relating to distribution has been going according to plan. Constraints in the implementation of the subsidized fertilizer distribution in the District Panti Jember. During this time as for the problems that occurred in the field is an issue that is considered small due to the problem can be solved, and the major problems that has been happening in other areas such as fertilizer and landfill diversion of subsidized fertilizer does not occur in the home.

Keywords : *Implementation, Distribution, Subsidized Fertilizer.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian terus di tuntut untuk berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa untuk negara, mencukupi penyediaan pangan di indonesia, dan bahan baku industri, serta untuk penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada kenyataannya sektor pertanian telah terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain, sehingga sektor pertanian di indonesia berperan sebagai penyangga pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Untuk dapat terus berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian membutuhkan sarana produksi yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, yaitu pupuk. Pupuk merupakan material yang di tambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang di perlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Untuk mendukung kemajuan sektor pertanian pemerintah memutuskan untuk membangun perusahaan (BUMN) Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. Untuk membantu meningkatkan

produktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat indonesia serta mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejah teraan petani, Menti Perindustrian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menti melalui Surat Keputusan Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 february 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan Kemenrian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan Menti Pertanian Indonesia Nomor 130/Permentan/Sr.130/11/2015 Tahun Anggaran 2016. dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Dalam setiap organisasi pemeriharaan, Penyaluran pupuk bersubsidi memegang peran yang penting, karena berhasil tindakanya pengelolaan organisasi secara baik serta tergantung juga dari seberapa baik kualitas penyaluran pupuk yang di subsidi oleh pemerintah. Demikian halnya pada tingkat kecamatan panti kabupaten jember, dimana kualitas penyaluran pupuk yang di subsidi pemerintah yang di berikan sangat tergantung dari peran distributor dan

pengecer di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Menurut pemberitaan di media masa dan desas - desus yang ada di masyarakat, Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti dirasa belum mencapai tujuan utama dari apa yang di inginkan pemerintah, karena masih ada saja kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tidak wajar, dan penyalah guanaan pupuk bersubsidi untuk perusahaan swasta, serta penyelewengan pupuk atau pupuk bersubsidi di kirim ke wilayah lain. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui bagaimana sistem Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Selain hal tersebut, hampir terjadi setiap tahun menjelang musim tanam para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk.

Halini terjadi karena pupuk yang biasanya tersedia di toko - toko pertanian seakan - akan menghilang dari peredaran, selanjutnya karena kebutuhan dari para petani banyak sedangkan ketersediaan pupuk berkurang bahkan bisa di katakan langka di pasaran maka hal ini menyebabkan melambungnya harga pupuk. Jika hal ini terjadi setiap tahun di awal musim tanam dan pemerintah sebagai penanggung jawab dalam hal ini tidak segera turun tangan mengatasi maka para petani di indonesia tetap akan menjadi objek permainan dari oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seiring dengan program peningkatan pangan. Pemerintah melalui suasebada beras seperti yang pernah indonesia capai pada pemerintahan pada masa orde baru maka permasalahan langkanya pupuk - pupuk pertanian di awal-awal musim tanam akan menjadi batu sandungan untuk mendukung program pemerintah tersebut. Hal ini selayaknya menjadi perhatian pemerintah melalui kementerian yang bersangkutan agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme Penyaluran pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini yang hendak dicapai, yaitu :

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan permasalahan penghambat penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh strata I (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Implementasi

Pengertian Implementasi

Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government, dalam arti hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *Governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan public, yakni : rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.

Menurut Van Meter dan Van Horn seperti dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, “ tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (1991 : 34). Dengan bertumpu pada pendapat-pendapat diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan *administrative* yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menumbuhkan ketaatan pada diri kelompok sasaran.

Implementasi juga menyangkut jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terikat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. kompleksitas implementasi bukan saja di tunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasi dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Setelah ditetapkannya suatu kebijakan tidak berarti bahwa masalah yang dihadapi sudah terselesaikan, masalah yang masih harus dihadapi adalah apakah kebijakan itu langsung dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai kesediaan diri untuk mengimplementasikannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel, faktor dan dimensi dan masing-masing saling berhubungan satu sama lain. Para ahli banyak mengemukakan pendapatnya tentang teori metode implementasi kebijakan.

Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*contex of implementation*). Variabel isi kebijakan menyangkut :

1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Jenis manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program

Sumber daya yang dilibatkan (AG. Subarsono, 90-94).Sedang variabel lingkungan implementasi menyangkut :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga dan penguasa.
3. kepatuhan dan daya tanggap.

Sedang Edward memandang bahwa : implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Mazmanian dan Sabatier mengembangkan model yang disebut sebagai kerangka analisis implementasi. Peran implementasi penting dari kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan cara cepat proses implementasi.

3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Usaha untuk melakukan, melaksanakan kebijakan tertentu, tentunya membutuhkan suatu keahlian dan keterampilan dalam menguasai persoalan yang hendak dikerjakan. Dalam hal ini birokrasi menempati kedudukan yang strategis, karena birokrasi yang berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga birokrasi senantiasa dituntut untuk mempunyai keterampilan dan keahlian yang tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjaring informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Kantor UPTD Pertanian wilayah Kecamatan Panti dan kantor PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) wilayah kecamatan panti.

Sumber Data (Populasi dan Sampel)

Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber “social situation” (Spradley; 1980). Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (place), aktivitas (activity), dan pelaku (actor). Tempat adalah ruang dengan segala aspek fisiknya, termasuk, dokumen, computer, compact disc (CD), dan perangkat keras lainnya. Aktivitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang akan digali melalui observasi. Pelaku adalah semua orang (pegawai) yang terlibat dalam situasi sosial. Sebagian pegawai dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka dinamakan informan.

Penetapan informan diteapkan dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan informasi informan peneliti akan menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Demikian seterusnya hingga informasi dianggap cukup. Metode penetapan informan ini disebut Snowball. Dengan menggunakan “Metode Snowball Sampling,” dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih tersebut dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Data atau Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dapat di bedakan berdasarkan sumber datanya (Marzuki, 2002:55). Sumber data ada dua macamyaitu: (1) Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya; dan (2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Datasekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil data statistik pendukung dari instansi-instansi terkait. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan instrument wawancara, observasi, dan studidokumenter.

Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisa yang digunakan penulis adalah analisa data di lapangan Model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung. penelitian kualitatif dilakukan analisa data dengan prosedur menurut miles dan huberman (1992:8) yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Implentasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan untuk mengetahui fakta-fakta apa jasanya yang menjadi penghambat dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi di welayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Namun demikian perlu disajikan kondisi lokasi penelitian

sebagai berikut : (Sumber data di ambil dari Polsek Panti).

- 1) Luas daerah dan data awal daerah
 - a) Luas Daerah : 93,96 km²
 - b) Jumlah Desa / kel : 7 Desa
 - c) Jumlah Dusun / lingk : 26 Dusun
 - d) Jumlah RW : 83 RW
 - e) Jumlah RT : 426 RT
 - f) Jumlah Penduduk : 59.399 Jiwa
- 2) Letak daerah Batas wilayah kecamatan
 - a) Wilayah Selatan : Kec. Rambipuji
 - b) Wilayah Barat : Kec. Bangsalsari
 - c) Wilayah Utara : Kec. Sukorambi dan Peg. Argopuro
 - d) Wilayah Timur : Kec. Sukorambi
- 3) Keadaan Topografi
Keadaan Topografi Kecamatan Panti dibagian Timur, Selatan dan Tenggara terdiri dari Sebelah Utara Pegunungan Argopuro (lereng Argopuro).
- 4) Keadaan Medan
 - a) Permukaan Bumi
Kecamatan Panti dengan dataran rendah terdapat ditengah, barat dan selatan dengan kondisi tanah yang subur berupa persawahan dengan tanaman padi serta palawija.
 - b) Sungai
 1. Sungai dinoyo Desa suci, Panti dan Glagawero
 2. Sungai Kaliputih Desa Kemiri
 - c) Gunung dan pegunungan
 1. Gunung Argopuro Desa kemiri, Suci dan Pakis

Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Komunikasi

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi. Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk Poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi. Fasilitas pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam Poktan. Pengurus Poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam Poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi. Informan penelitian Bpk. Sunaryo Ketua PPL wilayah Kecamatan Panti menyatakan bahwa.

“Petani memesan Pupuk Bersubsidi berdasarkan wilayah, luas tanah, dan kemampuan daya beli untuk

menebus pupuk yang sudah di pesan melalui RDKK.”

“Padadasarnya pembuatan RDKK sudah memenuhi syarat dan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah di tentukan. Tapi kadang – kadang petani tidak mampu menebus pupuk yang sudah di pesan sebelumnya akibatnya kios pengecer terlalu banyak stok pupuk.” (03-maret-2016)

Informan penelitian Bpk Trisno ketua klompok tani Tunjung Desa Panti menyatakan bahwa. Klompok tani memesan Pupuk melalui RDKK yang sudah di buat sebelumnya tapi kadang – kadang petani tidak mampu menebus pupuk yang sudah di pesan, karena Petani mengalami gagal panen dan hambatan – hambatan lainnya”(10-maret-2016)

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan kebutuhan Poktan selama 1 (satu) tahun, RDKK mengacu kepada RDK yang telah disusun oleh Poktan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi penyuluh pertanian;
2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk format yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua Poktan;
3. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
4. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilaksanakan paling lambat selesai pada awal bulan Februari;

5. RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap 5 (lima), untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), kepala desa/lurah, penyuluh, ketua Gapoktan dan ketua Poktan.

Peran penyuluh pertanian sangat penting dalam proses perencanaan kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian yang disusun oleh Poktan/Gapoktan melalui RDK/RDCK maupun RDKK Pupuk Bersubsidi. “pada dasarnya situasi pada saat pembuatan RDKK berjalan dengan Baik dan petani sudah memahami cara dan susunan untuk membuat RDKK serta selama beberapa tahun belakangan ini tidak ada permasalahan dan keluhan dalam pembuatan RDKK. Informan penelitian Bpk Bono anggota klompok tani dari Desa Kemunig menyatakan bahwa

“selama ini petani sudah mendapatkan pelatihan dan sarana untuk membuat daftar pesanan pupuk bersubsidi, akan tetapi masyarakat tidak tahu apa yang akan terjadi dimasa depan. misalnya petani sedang gagal panen atau petani dibingungkan oleh masalah cuaca maka biasanya petani mengalami krisis keuangan, akibatnya petani tidakdapat menebus pupuk yang sudah dipesan sebelumnya di kios pengecer pupuk bersubsidi.” (12-mater-2016)

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah menyalurkan melalui beberapa lini yaitu.

2. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau

di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

3. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
4. Lini III adalah lokasi gudang Distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen.
5. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.

Dalam pendistribusiannya pemerintah juga mengawasi dan mengawal pupuk bersubsidi hingga sampai ke tujuan. Semua ini di atur dalam peraturan menteri perindustrian dan perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Informan Penelitian Bpk Luhur kepala UPTD Pertanian wilayah Kecamatan Panti menyatakan bahwa.

“Dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi pemerintah sudah menyusun rapi cara pendistribusian pupuk bersubsidi, dengan begini penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan lancar ditambah lagi pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh setiap lembaga yang terkait, guna kelancaran pendistribusian Pupuk Bersubsidi.

Pemerintah memang menyebutkan bawa pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi peredaranya. “dari yang saya lihat di lapangan dalam proses pendistribusian pupuk dari lini satu sampai dengan lini empat berjalan dengan baik karena terbukti selama ini tidak terjadi permasalahan yang berarti.

Sumber Daya

Distributor wilayah Kecamatan Panti (Lini III)

Pemerintah Menunjuk distributor sebagai penyuplai Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti yaitu CV HIDUP BARU dan CV KERTOPATEN.

1. CV HIDUP BARU Menyuplai Pupuk Bersubsidi ZA, SP 36, NPK dan Organik.
2. CV KERTOPATEN Menyuplai Pupuk Bersubsidi UREA.

Informan penelitian Bpk Yandi Kepala CV HIDUP BARU menyatakan bahwa.

“Pendistribusian Pupuk Petrokimia berjalan baik dan lancar hampir sesuai dengan SK Bupati 2016 dan kondisi di lapangan. Pada jenis pupuk NPK dan ZA terjadi over penyaluran terhadap SK Bupati”

- *Alokasi realisasi NPK : 183.5 TON*
- *Alokasi SK Bupati NPK : 106.5 TON*
- *Alokasi realisasi ZA : 186.5 TON*
- *Alokasi SK Bupati ZA : 1592 TON*

“selama ini pendistribusian pupuk bersubsidi sudah memenuhi syarat dan tidak pernah ada permasalahan yang berarti semua masih bisa di atasi adapun kelebihan stok pupuk Bersubsidi biasanya di sisahkan untuk bulan berikutnya” (04-maret-2016)

Informan Penelitian Ibu Yani pemilik kios rosalia Desa Kemuningsari lor menyatakan bahwa.

“Biasanya distributor mengirimkan pupuk bersubsidi menggunakan truk dengan muatan penuh dalam beberapa periode/tahap dan kadang-kadang pendistribusianya telat”

“Pupuk Bersubsidi yang di dikirim oleh distributor biasanya melebihi atau kurang dari jumlah yang sudah

di tetapkan sebelumnya, tapi permasalahan ini sering terjadi dan kios pengecer menganggap permasalahan yang biasa, apa bila kurang ataupun lebih maka akan d alokasikan bulan berikutnya”(10-maret-2016)

Jumlah Pupuk Bersubsidi yang di suplai ke kios pengecer sudah ditentukan menurut RDKK yang sudah di buat beselumnya. dan harga Pupuk Bersubsidi sudah di tentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian tentang HET (Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi). “permasalahan yang terjadi lapangan Distributor Pupuk Bersubsidi selalu saja melakukan kesalahan. Seperti kelebihan atau kekurangan stok Pupuk Bersubsidi dan pengiriman yang sering telat disaat petani membutuhkan Pupuk, tetapi distributor menganggap permasalahan ini menjadi permasalahan yang biasa dan dapat di tangani. Informan Penelitian Bpk Sunaryo kepala PPL wilayah Kecamatan Panti menyatakan bahwa. masalah yang biasanya dihadapi Kios pengecer adalah kelebihan atau kekurangan Pupuk Bersubsidi dan biasanya kesalahan tersebut dilakukan oleh distributor. Tapi hal ini tidak menjadi masalah karena jika lebih ataupun kurang maka akan di kirim bulan berikutnya. (3-maret-2016)

Kios Pengecer Wilayah Kecamatan Panti (Lini IV)

Kios pengecer yaitu pengecer Pupuk Bersubsidi yang di tunjuk atau di tetapkan oleh distributor untuk melayani pembelian dengan jumlah kecil yang besarnya sudah di tentukan sesuai SK Bupati dan RDKK. Di wilayah Kecamatan Panti terdapat 7 desa, 19 kios dan 53 klompok tani. Penyalur lini IV / kios pengecer yang di tujuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) harga eceran tertinggi

Pupuk Bersubsidi di tetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea : Rp 1.800 / kg
- Pupuk SP – 36 : 2.000 / kg
- Pupuk ZA : 1.400 / kg
- Pupuk NPK : 2.300 / kg
- Pupuk Organik : 500 / kg

Sumber data: Peraturan Menteri Pertanian tentang HET th 2016

HET Pupuk Bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di lini IV secara tunai degan kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea 50 kg
- Pupuk SP – 36 50 kg
- Pupuk ZA 50 kg
- Pupuk NPK 50 kg
- Pupuk Organik 40 kg

Sumber data: Peraturan Menteri Pertanian tentang HET th 2016

Kusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA berwarna jingga (orange).Kemasan Pupuk Bersubsidi harus di beri label tambahan berwarna merah yang bertuliskan :

PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN

Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Wilayah Kecamatan Panti :

- Pupuk Urea : 2.678,51 ton
- Pupuk SP – 36 : 95.00 ton
- Pupuk ZA : 1056,42 ton
- Pupuk NPK : 706,41 ton
- Pupuk Organik 144,22 ton

Sumber data: Peraturan Menteri Pertanian tentang HET th 2016

Informan penelitian Ibu yani pemilik kios rosalia Desa Kemuningsari lor menyatakan bahwa.

“kios pengecer menjual kepada kelompok tani menurut RDKK yang sudah di pesan sebelumnya, mengenai harga Pupuk Bersubsidi kios sudah menjual sesuai dengan harga yang sudah di tentukan. menurut SK bupati mengenai harga eceran tertinggi”

“biasanya Petani tidak menebus pupuk yang sudah di pesan sebelumnya alasannya petani sedang gagal panen dan alasan - alasan lainnya”

“karena petani tidak menebus pupuk yang sudah di pesan, akibatnya kios pengecer menjual kepada petani dari desa lain yang membutuhkan pupuk. meskipun itu dilarang oleh pemerintah tapi kios pengecer tidak mau rugi” (10-maret-2016)

Informan penelitian Bpk Sunaryo petugas PPL wilayah Panti.

“Selain ini kios pengecer sudah menjual pupuk Bersubsidi dengan harga yang sudah di tentukan oleh pemerintah dan tidak melebihi HET

“Harga Pupuk Bersubsidi di wilayah Panti : (03-maret-2016)

- UREA : Rp. 180.000 / kwt
- ZA : Rp. 140.000 / kwt
- SP – 36 : Rp. 200.000 / kwt
- NPK : Rp. 230.000 / kwt
- ORGANIK : Rp. 50.000 / kwt

Informan penelitian Bpk Tinggal petani yang bukan anggota kelompok tani desa panti menyatakan bahwa.

“Saya membeli Pupuk Bersubsidi di kios tanpa mengalami kesulitan karena persediaan Pupuk Bersubsidi di kios masih banyak, jika kios pengecer pupuk bersubsidi di desa saya tidak ada maka saya mencari pupuk Bersubsidi di kios

Desa lain. Alasan mengapa saya tidak ikut kelompok tani karena lahan yang saya garap hanya lahan sewaan yang letaknya di desa lain.”(15-maret-2016)

Kios pengecer sebagai Lini IV berperan sangat penting terhadap kelancaran dan ketepatan dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi “dalam kenyataannya di lapangan kios pengecer seringkali melakukan pelanggaran yang cukup serius tapi para pemilik kios menganggap hal ini biasa saja. Biasanya kios pengecer menjual pupuk Bersubsidi kepada petani dari desa lain alasannya karena stok pupuk yang berlebihan. dan tidak semua hal berjalan dengan buruk, semua kios pengecer di Kecamatan Panti menjual Pupuk bersubsidi dengan harga yang sama dan tidak melebihi HET.” Informan penelitian Bpk Sunaryo Ketua PPL wilayah Kecamatan Panti menyatakan bahwa. “Padadarnya mendistribusikan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti tahun ini berjalan lancar. Mengenai jumlah alokasi Pupuk bersubsidi dan HET Pupuk Bersubsidi berjalan sesuai rencana. Dan mengenai alokasi pupuk bersubsidi untuk sub sektor perternakan dan perikanan alokasinya di alihkan ke sub sektor Tanamanpangan Holtikultura dan sektor Perkebunan”(3-maret-2016)

Klompok tani

Klompok tani adalah kelompok yang di buat karena memiliki tujuan yang sama dan sebagai wadah komunikasi antar petani. Berdasarkan SK Bupati surat keputusan tersebut di lengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja kelompok tani. Berdasarkan SK bupati terdapat empat sub sektor pertanian yang mendapatkan alokasi subsidi pupuk yaitu sektor tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan. Tapi di wilayah kecamatan panti hanya terdapat dua sub sektor pertanian

yaitu tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Jadi alokasi berdasarkan SK bupati untuk empat sub sektor tersebut di berikan hanya kepada dua sub sektor yaitu untuk sertor tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Informan penelitian Agung suyono ketua klompok tani Cempaka 1 di Desa pakis menyatakan bahwa.

“klompok tani sebenarnya merasa masih kesulitan untuk menebus atau membeli Pupuk Bersubsidi karena masih banyak anggota kolompok kami yang sulit karena gagal panen dan masalah keuangan”

“Biasanya kios pengecer kehabisan stok Pupuk Bersubsidi karena telat pendistribusianya akibatnya petani membeli / mencari pupuk di kios wilayah lain”

“Selama ini pemerintah sudah cukup peduli kepada petani karena pemerintah sudah memberikan bantuan seperti penyuluhan petisida bantuan Traktor dan sudah cukup banyak fasilitas kepada petani untuk menyampaikan aspirasinya (11-maret-2016)

Informan Penelitian Bpk. Sunaryo pegawai PPL wilayah Panti menyatakan bahwa.

“Petani yang tidak ikut persatuan klompok tani merasa kesulitan untuk mendapatkan Pupuk Bersubsidi karena petani tersebut tidak masuk dalam RDKK. Atau pesanan Pupuk Bersubsidi serta petani tersebut hanya membunyai lahan sewaan yang tidak luas”

“Petani yang tidak ikut dalam persatuan klompok tani biasanya membeli pupuk di kios yang stok Pupuk bersubsidinya berlebih atau tidak di ambil oleh pemesan” (03-maret-2016)

Informan penelitian Bpk Parjo Ketua Kelompok tani Sumber kembar Desa Pakis menyatakan bahwa.

“Selama ini petani perkenunan merasa sangat kekurangan dan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan jumlah petani kebun cukup banyak serta luas perkebunan di wilayah kecamatan panti sangat luas dan alokasi pupuk yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan petani perkebunan”(16-maret-2016)

Tabel 4.9

NO	DESA DAN KIOS PENGE CER	KELOMPOK TANI
Tanaman Perkebunan Rakyat		
1	Pakis : Barokah Indah	Sumber Kembar
2	Pakis : Tani Makmur	Cempaka I

Sumber data : di ambil dari Kantor PPL wilayah Panti

Sektor wilayah kecamatan panti terdapat dua klompok menurut subsektornya, yaitu sektor tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 49 kelompok dan sektor perkebunan hanya ada 2 kelompok.”kenyataan yang terjadi di lapangan petani masih mengeluhkan harga Pupuk Bersubsidi yang terbilang cukup mahal dan petani mengharapkan Pupuk bersubsidi harganya diturunkan. sebagian petani di wilayah Kecamatan Panti sudah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari pemerintah dan sebagian lagi petani tidak merasa dibantu atau di mudahkan oleh pemerintah. Pada intinya pemerintah dalam hal ini lembaga atau kelompok yang mengatasnamakan menaungi petani masih

belum adil dan merata dalam mensejahterakan petani di wilayah Kecamatan Panti.

Disposisi

Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan pelaksana kebijakan untuk tetap berada dalam tujuan program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

1. Distributor Pupuk Bersubsidi merupakan poin utama dalam mekanisme pendistribusian Pupuk Bersubsidi, dalam hal ini distributor bekerja / bertugas menyuplai pupuk bersubsidi kepada kios pengecer di wilayah Panti. Akan tetapi meskipun selama ini tidak begitu terlihat terjadi masalah namun ada permasalahan yang di anggap ringan oleh distributor seperti pendistribusian yang telat dan suplai pupuk yang berlebihan. tapi ini merupakan permasalahan yang serius karena dapat mengakibatkan kelangkaan pupuk. ini membuktikan bahwa sikap atau tanggung jawab kerja yang dilakukan distributor tidak maksimal.
2. Kios pengecer pupuk Bersubsidi dalam hal ini bertugas sebagai penjual pupuk Bersubsidi kepada petani, karakteristik pemilik kios

pengecer di wilayah Panti ada beberapa kios yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar seperti menjual pupuk bersubsidi kepada orang dari desa lain itu merupakan perilaku pemilik kios pengecer karena pemilik kios pengecer ingin cepat mendapatkan untung.

3. Pihak yang mengawal dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, dalam hal ini para petugas sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sikap yang terbuka dan informatif kepada petani dan pemilik kios pengecer merupakan sesuatu yang sangat mendukung keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Panti

informan penelitian Bpk Hariyanto Kanit Intel Polsek Panti menyatakan bahwa.

“Kecenderungan perilaku petugas di lapangan pada dasarnya sudah baik, misalnya dalam hal pembuatan RDKK sampai proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi sudah berjalan terbuka dan kooperatif, masing-masing lembaga sudah menjalankan perannya dengan baik. Terbukti selama ini dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak terjadi permasalahan yang berarti semua permasalahan dapat di atasi dan berjalan sesuai prosedur.” (12 maret 2016)

“yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi selama ini sikap kerja dari distributor dan kios pengecer yang menganggap ringan permasalahan yang di anggap kecil oleh distributor dan kios pengecer. menurut saya itulah yang menjadi permasalahan utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Struktur Birokrasi

Pengawasan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi pemerintah menyalurkan melalui beberapa lini yaitu Lini I, Lini II, Lini III, Lini IV. Pupuk Bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang diawasi, maka dalam implementasinya pemerintah membentuk suatu badan yang mengawasi dan mengawal penyaluran pupuk Bersubsidi di wilayahnya masing – masing dalam hal ini pemerintah Kabupaten membentuk klompok yang di namakan TP3 (Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida) yang anggotanya terdiri dari perwakilan dinas perdagangan perindustrian, dinas pertanian dan bagian ekonomi Pemkab Jember. Informan penelitian Bpk. Luhur kepala UPTD wilayah panti menyatakan bahwa.

“Kineja TP3 selama ini selama ini di rasa cukup baik karena terbukti selama beberapa tahun belakangan ini tidak terjadi permasalahan yang fatal”
“Tugas TP3 yaitu mengawasi legalitas pupuk dan pestisida, penguasaan distribusi, pengawasan dalam formulasi yang terkandung dalam pupuk dan pestisida. Dan TP3 selalu berkoordinasi antar lembaga. dalam Implementasinya di wilayah panti ada badan atau instansi yang mengawasi dan mengawal penyaluran Pupuk bersubsidi.” (03-maret-2016)

Informan penelitian Bpk Hariyanto Kani intel Polsek Panti menyatakan bahwa.

“Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah panti sudah baik. penyaluran dari distributor ke kios dan sampai kepetani sudah baik dan lancar”
“Mengenai harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi kios – kios menjual dengan harga yang sudah di tentukan”
“Selama ini tidak ada permasalahan yang serius selama beberapa tahun

ini. hanya saja terjadi permasalahan pendistribusian yang telat dan masalah tersebut dapat diatasi”

“Isu-isu penyelewengan dan penimbunan Pupuk Bersubsidi yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di wilayah panti” (12-maret-2016)

Guna menjaga pendistribusian Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti berjalan lancar maka lembaga atau Badan yang mengawasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Panti yaitu :

- UPTD wilayah Kecamatan Panti sebagai alat atau pelaksana, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) bertugas sebagai pengamat terhadap penyakit tanaman dan tugas tambahan menjadi anggota TP3.
- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bertugas melakukan penyuluhan pertanian, melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengevaluasi dan melaporkan penyuluhan pertanian
- Polsek bertugas sebagai pemantau distribusi Pupuk Bersubsidi
- Koramil bertugas sebagai pengawas Petani dan Kelompok tani

“dalam penyanyuran pupuk bersubsidi fungsi pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan sudah cukup baik karena terbukti selam ini tidak ada masalah yang berarti. mengenai masalah Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti.

Faktor - faktor yang menjadi penghambat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Sumberdaya

Distributor Wilayah Kecamatan Panti Lini III

Distributor sangat berperan penting terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti terutama untuk menyuplai kios-kios yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Panti maka distributor harus memiliki manajemen yang baik dan kualitas yang baik agar dapat terus konsisten dan tepat sasaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Informan penelitian Ibu Yani pemilik kios Rosalia Desa Kemuningsari Lor menyatakan bahwa.

“Distributor mengirimkan pupuk bersubsidi kepada kios resmi berdasarkan RDKK yang dibuat oleh kelompok tani dan jumlah kelompok tani yang ada di setiap desa. Tapi biasanya distributor melakukan kesalahan, seperti kelebihan atau kekurangan stok pupuk bersubsidi dan di sertai pengiriman pupuk bersubsidi yang kadang-kadang telat.”(10 maret 2016)

Memang dalam proses pendistribusian kecepatan dan ketepatan menjadi poin utama yang harus dikerjakan dengan tepat. disini distributor wilayah Kecamatan Panti lengah dalam kecepatan dan ketepatan pendistribusian tersebut. Informan Penelitian Bpk Sunaryo Ketua PPL wilayah Kecamatan Panti menyatakan bahwa.

“memang benar dalam pengiriman pupuk bersubsidi distributor ke kios pengecer mengalami permasalahan seperti kelebihan atau kekurangan pengiriman pupuk akan tetapi jika terjadi maka stok pupuk bersubsidi akan di sisakan bulan berikutnya atau dikirimkan bulan berikutnya. Dan mengenai pengiriman yang

telat ke kios pengecer itu karena pupuk bersubsidi memang belumsampai ke distributor.”(3 maret 2016)

Informan penelitian Bpk Yandi Kepala CV HIDUP BARU menyatakan bahwa.

“Jumlah pengiriman yang banyak kadang kadang membuat pekerja kami kebingungan atau kadang kadang terjadi kesalahan penghitungan maka biasanya pengiriman mengalami kelebihan ataupun kekurangan stok pupuk bersubsidi. Mengenai pengiriman yang telat memang pupuk bersubsidi tidak ada di gudang atau pengiriman dari lini II mengalami keterlambatan.”(4 Maret 2016)

Kios Pengecer

Kios pengecer berperan penting dalam menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani / kelompok tani yang berada di wilayahnya masing-masing maka kios pengecer mempunyai tanggung jawab yang harus di jalankan dengan tepat untuk menyuplai pupuk bersubsidi di wilayahnya. Informan penelitian Ibu Yani pemilik kios Rosalia Desa Kemuning sari lor menyatakan bahwa. “Pupuk bersubsidi yang di pesan petani melalui RDKK biasanya tidak di tebus oleh petani akibatnya kios pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada petani dari Desa lain karena kios pengecer tidak mau rugi.”(10 Maret 2016). Menurut Bpk Bono anggota kelompok tani Desa Kemuningsari Lor menyatakan bahwa. Petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi dikarenakan mengalami krisis keuangan ataupun gagal panen.”(13 Maret 2016).

Ya memang permasalahan penebusan atau pembelian pupuk ke kios pengecer oleh petani menjadi permasalahan

yang di anggap sudah biasa akan tatapi kios pengecer menyikapinya dengan menjual pupuk kepada petani dari desa lain. itu melanggar ketentuan menurut SK bupati Th 2016 tentang kios pengecer harus melayani dan hanya melayani penjualan pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Studi kasus di Kecamatan Panti Kabupaten Jember) tahun 2016. Dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Panti dimulai dari kelompok tani yang di dampigi oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) membuat RDK/RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yaitu daftar pesanan Kelompok tani untuk satu tahun yang di buat Berdasarkan luas wilayah, tanah dan jumlah kelompok tani yang ada di wilayahnya. Jumlah alokasi untuk wilayah Kecamatan Panti yaitu Pupuk Urea : 2.678,51 ton, Pupuk SP – 36 : 95.00 ton, Pupuk ZA : 1056,42 ton, Pupuk NPK : 706,41 ton, Pupuk Organik 144,22 ton. dan harga eceran tertinggi Pupuk Urea : Rp 1.800 / kg, Pupuk SP – 36 : 2.000 / kg, Pupuk ZA : 1.400 / kg, Pupuk NPK : 2.300 / kg, Pupuk Organik : 500 / kg. Dalam pendistribusian Pupuk Bersubsidi dimulai dari Lini I, Lini II, Lini III, Lini IV, Kios pengecer sampai ke petani. Pengawasan dan pengawalan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah

Kecamatan Panti disasa cukup baik karena lembaga yang saling berkomunikasi dengan baik.

Faktor - faktor yang menjadi penghambat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dilakukan oleh distributor yang mengalami kualahan dalam melakukan pengiriman dan kesalahan dalam menejemen dan pengkitungan pengiriman pupuk bersubsidi serta kios pengecer yang melanggar ketentuan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada petani dari desa lain.

1.2 Saran

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan panti sebenarnya sudah baik. tapi alangkah baiknya jika para penyelenggara / pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi seperti pihak Distributor Wilayah Panti dan pemilik kios pengecer memiliki SDM yang baik agar dapat memaksimalkan proses penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk memperbaiki kualitas pendistribusian pupuk bersubsidi oleh distributor pelaku distributor harus memiliki SDM yang baik. Agar tidal lagi terjadi kesalahan- kesalahan sebelumnya terjadi. dan kios pengecer harus bernegosiasi kepada petani di wilayahnya untuk mencari jalan keluar seperti pupuk bersubsidi di bayar secara berkala / cicilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 1991, Jakarta: Bumi Aksara.
- AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basu Swastha DH, (1984), *Azas-azas Marketing*, Edisi ke-3; Leberly; Yogyakarta
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/Mpp/Kep/2/2003 *Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*
- Kotler, Philip. (1997). *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Edisi Sembilan. Alih Bahasa, Hendra Teguh. Penerbit PT. Prenhallindo: Jakarta
- Mathew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, Inc, 1984
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII. Madcoms. 2002. *Database Visual Basic 6.0 dengan Crystal Reports*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasution, 1995, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, Jakarta: Bina Aksara
- Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130 /Permentan /Sr.130/11/2015 *Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2015 *Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016*.

Patton, Carl. V dan David S. Sawicki.1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall Upper Saddle River N.J 07458.

Ripley and Franklin; 1982; *Policy Implementation and Bureaucracy*; Chicago; Dorsey Press. Chicago

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta

Spradley, J.P. 1980. *The Participation Observation*. New York: Reinhart & Winston.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Thomas J. Peters and Robert H Waterman Thorndike (1982), *In Search of Excellence. Lesson from America's Best Run Companies.*, Maine : G.K. Hall

Winardi, 1989, *Strategi Pemasaran (Marketing Strategy)*, Bandung : Mandar Maju.